

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGY IN A FOREST FIRE AND
FIELD ROKAN HILIR DISTRICT**

Rahmad Dani¹, Defri Yoza², Rudianda Sulaeman²,
Departement of Forestry, Faculty of Agriculture, University of Riau
Address Bina Widya, Pekanbaru, Riau
(rahmaddani79@gmail.com)

ABSTRACT

This research aimed to determine the socio-economic conditions of people who become the root causes of forest fires and field, obtain information efforts to control forest fires and land that has been done by the public and develop appropriate strategies to empower communities in the implementation of the prevention of forest fires in Rokan Hilir. This research is descriptive. The collection of data on community empowerment strategies in the prevention of forest fires and field with interviews and direct observations. The analysis used in this study is a descriptive analysis using analytical techniques and percentage SWOT analysis. The social conditions that influence the occurrence of forest and field fires in Rokan Hilir is the level of the majority of people who are not in school and worked as a farmer clearing by culture and economic situation of people who lands <2 hectare burning education. Forest fire prevention efforts undertaken by the field is public worked together to set fire using simple tools and semi-mechanical tools. Community empowerment strategies for the prevention of forest fires and land is established good cooperation among agencies, improve people skills, develop types of horticultural crops pineapple, using their areas, the government socialize penalty facilitate the heavy equipment and additional suppression of forest fires and strict enforcement tools.

Keywords: Community development, prevention of forest fires and field

PENDAHULUAN

Riau merupakan daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Wilayah dengan potensi kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Provinsi Riau salah satunya di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kepenghuluan Pujud dan Rantau Bais. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, namun belum berhasil. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan didukung oleh lemahnya kondisi ekonomi masyarakat dan rendahnya

tingkat pendidikan masyarakat yang sangat mempengaruhi pengelolaan sumber daya dan lingkungannya.

Menurut Bapedal Provinsi Riau dalam hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2007, permasalahan kebakaran hutan dan lahan tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang semakin terpuruk. Pendidikan masyarakat dipedesaan sangat mempengaruhi perilaku dalam pengelolaan dan lingkungannya, sehingga mentaati ketentuan yang

1. Mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau
2. Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau
Jom Faperta Vol. 2 No. 1 Februari 2015

berlaku terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mendapatkan informasi upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh masyarakat serta merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi strategi pemberdayaan masyarakat agar menjadi alternatif pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini berlokasi di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud dan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai Juni 2014 sampai dengan Juli 2014. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner dan daftar pertanyaan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat tulis, perekam suara (*recorder*), kamera dan seperangkat komputer.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengumpulan data mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan wawancara langsung dan observasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan teknik analisis persentase dan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi umum lokasi penelitian

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha terdiri dari 15 kecamatan. Topografi Kabupaten Rokan Hilir relatif datar berada pada ketinggian 1,5-6,8 m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa terutama di sepanjang Sungai Rokan. Kabupaten Rokan Hilir beriklim basah dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 300 mm/tahun.

Lokasi penelitian ini terletak di Kepenghuluan Rantau Bais dan Kepenghuluan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kepenghuluan Rantau Bais memiliki luas wilayah seluas 322,5 km² dan luas wilayah Kepenghuluan Pujud adalah 119,00 km².

Tingkat Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais dan Kepenghuluan Pujud

Penduduk Kepenghuluan Rantau berdasarkan data monografi Kepenghuluan Rantau Bais berjumlah 3.977 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.916 jiwa (48%) dan penduduk perempuan 2.061 jiwa (52%). Kepenghuluan Pujud yang memiliki jumlah penduduk sekitar 4.063 jiwa, penduduk laki-laki 2.092 jiwa (51%) dan penduduk perempuan 1.971 jiwa (49%). Kepenghuluan Pujud memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan Kepenghuluan Rantau Bais.

Karakteristik Responden

a. Responden Berdasarkan Umur

Pada penelitian ini identitas responden berdasarkan umur berkisar antara 21-60 tahun. responden didominasi oleh umur 41- 45 tahun sebesar 26.67%. Umur responden tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap karena masyarakat yang

tinggal cukup lama di suatu daerah akan mengetahui proses dan penyebab perubahan yang terjadi pada daerah tersebut, begitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan.

b. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama persepsi masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat yang menjadi responden sebagian besar berpendidikan lulus SD yaitu 53,33% dari jumlah responden

c. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Masyarakat di lokasi penelitian memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, hal ini tentu dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Sunanto (2008)

Faktor Sosial Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh faktor sosial masyarakat. Adapun faktor sosial penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah tingkat pendidikan, budaya masyarakat dalam membuka lahan dan pekerjaan masyarakat. Faktor sosial ekonomi dan ketidaktahuan penduduk merupakan pendorong utama atas terjadinya kebakaran hutan (Mangandar, 2002).

a. Tingkat Pendidikan

Pola pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan cara membakar dan menebas. Tingkat pendidikan dan persepsi masyarakat dalam teknis pembukaan lahan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat pendidikan dan persepsi teknis pembukaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Dibakar	%	Ditebas	%	Jumlah Responden	%
1	Tidak Sekolah	7	87,5	1	12,5	8	13,33
2	Pendidikan Dasar	30	75	10	25	40	66,67
3	Pendidikan Atas	5	41,67	7	58,33	12	20

Sumber: Olahan Data 2014

pekerjaan penduduk akan sangat terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan. Sebagian besar masyarakat yang menjadi responden memiliki pekerjaan sebagai petani, yaitu 65% dari total jumlah responden.

d. Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pendapatan dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, hubungannya ialah kemampuan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar atau menebas. Pendapatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir yang paling banyak adalah >Rp.2.000.000 yaitu 65% dari jumlah responden.

Pada Tabel 10 terlihat masyarakat yang Tidak Sekolah paling banyak menyebutkan bahwa teknis pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat adalah dengan cara membakar yaitu 87,5%, selanjutnya masyarakat yang memiliki Tingkat Pendidikan Dasar 75% menyebutkan teknis yang digunakan masyarakat adalah dengan cara membakar. Tingginya persentase masyarakat yang menyebutkan bahwa teknis yang digunakan dalam membuka lahan adalah dengan cara membakar, dipengaruhi oleh terbatasnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif akibat teknis pembukaan lahan dengan cara membakar.

b. Budaya Masyarakat Membuka Lahan

Pada awalnya masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir membuka lahan dengan cara mengimbas dan membakar. Kegiatan tersebut sudah membudaya secara turun temurun dan masih sering digunakan oleh masyarakat. Praktek dan kebiasaan dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar selama ini berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan secara luas karena masyarakatnya bergotong royong menjaga api, namun akhir-akhir ini budaya menjaga api tersebut sudah mulai hilang karena kesibukan masyarakat yang tinggi.

c. Pekerjaan Masyarakat

Data pekerjaan masyarakat diperlukan terkait dengan persepsi pola pembukaan lahan perkebunan terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan. Adapun data pekerjaan masyarakat dan persepsi teknis pembukaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Pekerjaan masyarakat dan persepsi teknis pembukaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Pekerjaan	Dibakar	%	Ditebas	%	Jumlah Responden	%
1	Petani	29	74,36	10	25,64	39	65
2	Bukan Petani	13	61,90	8	38,10	21	35

Sumber: Olahan data 2014

Pada Tabel 11 terlihat masyarakat yang bekerja sebagai petani menyebutkan masyarakat cenderung membuka lahan dengan cara membakar yaitu sebesar 74.36% dan yang bukan petani sebesar 61.90%. Hal tersebut dikarenakan aktivitas masyarakat yang bekerja sebagai petani melihat masyarakat pada umumnya membuka lahan dengan cara

di bakar dengan alasan biaya yang murah dan waktu yang relatif singkat.

Faktor Ekonomi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan

Kondisi ekonomi masyarakat secara tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan disuatu kawasan. Syahadat dan Sianturi (2009), menyatakan faktor-faktor pendorong sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah faktor ekonomi.

a. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Kondisi ekonomi berupa pendapatan masyarakat kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan adalah kemampuan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara tebas, sedangkan masyarakat yang ekonominya tergolong lemah akan membuka lahan dengan cara membakar karena dinilai lebih mudah dan biaya yang murah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Yoza (2012), yang menyebutkan kemiskinan masyarakat biasanya membuat masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya dengan mengeskplotasi

sumberdaya alam. Masyarakat mengeksplotasi sumberdaya alam dengan melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan untuk membuka kebun. Adapun pendapatan masyarakat dan persepsi teknis pembukaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pendapatan masyarakat dan persepsi teknis pembukaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir

NO	Pendapatan (Rp)	Dibakar	%	Ditebas	%	Jumlah Responden	%
1	500,000-1,400,000	3	50	3	50	6	10
2	1,500,000-2,000,000	10	66.67	5	33.33	15	25
3	>2,000,000	28	71.80	11	28.20	39	65

Sumber : Olahan Data 2014

Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan >Rp.2.000.000 menyatakan teknik pembukaan lahan yang digunakan masyarakat adalah membakar sebesar 71.80% dan 66.67% masyarakat yang memiliki pendapatan 1.500.000-2.000.000 juga menyebutkan hal yang sama. Masyarakat yang memiliki pendapatan >Rp.2.000.000 cenderung membuka lahan dengan cara membakar tidak dipengaruhi oleh ketidakmampuan biaya membuka

bahwa masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir memiliki ketimpangan yang tinggi.

b. Luas Lahan

Kepemilikan lahan oleh masyarakat yang digunakan sebagai perkebunan dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Sunanto, 2008). Lahan yang dimiliki masyarakat umumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Kepemilikan lahan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Data kepemilikan lahan masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memiliki Lahan	49	81.67
2	Tidak Memiliki lahan	11	18.33
	Jumlah	60	100

Sumber : Olahan data 2014

lahan, melainkan masyarakat menyangsikan hasil yang diperoleh jika tidak menggunakan api dalam proses penyiapan lahan tersebut, baik dari segi kemudahan menanam ataupun dari segi hasil, dan hal ini berbeda dengan pernyataan Yuadji (1981) dalam Rachmatsjah *et al.* (1985), semakin rendah tingkat pendapatan penduduk, akan semakin kecil pula daya dukung terhadap lingkungan seperti membuka lahan dengan membakar. Distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir dihitung dengan menggunakan Koefisien Gini (Lampiran 3). Hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat paling tertinggi adalah Rp.5.000.000 dan terendah adalah Rp.800.000 dengan nilai Koefisien Gini 5.1026 atau $KG > 0.5$. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terlihat masyarakat yang memiliki lahan lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki lahan yaitu 81.67% memiliki lahan dan 18.33% tidak memiliki lahan (lihat pada Tabel 18). Tingginya kepemilikan lahan oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat konversi lahan, seperti yang terjadi di Kepenghuluan Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir, banyaknya masyarakat menggunakan lahan yang ada sebagai kebun kelapa sawit. Hal ini mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini juga sesuai dengan pernyataan Lakitan dan Negara (2001), tingginya kepemilikan lahan oleh masyarakat seiring dengan tingginya tingkat konversi lahan, pembuatan kanal dan saluran drainase yang menyebabkan

turunnya muka air tanah sehingga rentan terhadap kebakaran terutama pada musim kemarau.

Berikut data luas lahan masyarakat dan persepsi teknis pembukaan lahan pada Tabel 15.

Tabel 15. Data luas lahan masyarakat dan persepsi teknis pembukaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Luas Lahan	Dibakar	%	Ditebas	%	Jumlah Responden	%
1	Tidak Memiliki Lahan	8	72.72	3	27.28	11	18.33
2	<2 ha	8	80	2	20	10	16.67
3	2-4 ha	26	66.67	13	33.33	39	65

Sumber: Olahan data 2014

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di Kabupaten Rokan hilir masyarakat yang memiliki lahan <2 ha menyebutkan bahwa teknik yang dipakai masyarakat dalam membuka lahan adalah dengan cara dibakar yaitu sebesar 80% dan masyarakat yang tidak memiliki lahan 72.72% nya menyebutkan hal yang sama (lihat pada Tabel 15). Masyarakat yang tidak memiliki lahan dan masyarakat yang memiliki lahan <2 ha membuka lahan dengan cara membakar, karena masyarakat cenderung memperluas lahannya dan membuka lahan dengan cara tersebut adalah cara termurah dan termudah.

Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau laut dan udara.

Besarnya dampak yang di timbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut telah mendapat perhatian yang sangat serius baik di dalam

maupun di luar negeri. Berbagai langkah dan upaya telah dilaksanakan oleh satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SATLADARKARHUTLA)

Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka

menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

a. Upaya Penanggulangan Oleh Pemerintah

Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah cukup banyak. masing-masing instansi melakukan penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan peran serta masyarakat setempat dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Suksesnya kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung pada keberhasilan membawa masyarakat lokal dalam semangat untuk mempertahankan kelestarian hutan. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk terlibat secara penuh dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, karena masyarakat lebih menguasai medan dan lokasi selain itu masyarakat juga punya tanggung jawab karena areal yang dipadamkan adalah wilayah mereka.

b. Upaya Penanggulangan Oleh Masyarakat

Sejauh ini yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah mengumpulkan masyarakat sekitar lokasi kebakaran, serta bergotong royong untuk mematikan api dengan

menggunakan alat-alat sederhana seperti: timba, ember dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan selama ini masyarakat belum banyak mengetahui seperti apa keterlibatan yang harus mereka lakukan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani kebakaran, Adanya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, masyarakat dapat menggunakan alat-alat semi mekanis sebagai alat pemadaman api seperti mesin air.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

A. Faktor Internal

Faktor utama penjabaran faktor internal ini adalah menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam kerjasama yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

a. Kekuatan (*Strength* – S)

1. Adanya komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
2. Adanya institusi di tingkat Kabupaten seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda), Dinas Kehutanan dan Dinas Perekebunan yang berperan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Adanya minat masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
4. Adanya kesesuaian lahan untuk tanaman hortikultura jenis nenas

b. Kelemahan (*Weakness* – W)

1. Terbatasnya fasilitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik sarana peralatan

pemadaman kebakaran maupun prasarana pendukungnya.

2. Lemahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga mempengaruhi pola pembukaan lahan dengan cara membakar.
3. Perhatian pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan masih bersifat insidental (perhatian hanya ada pada saat kebakaran terjadi).
4. Belum adanya teknologi penyiapan lahan gambut yang mudah dan murah selain dengan cara bakar.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dibahas terfokus pada penjabaran peluang dan ancaman yang ada dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

a. Peluang (*Opportunity* – O)

1. Adanya program pemerintah seperti kebun rakyat yang dapat membantu masyarakat dalam pembukaan lahan tanpa bakar.
2. Banyaknya pihak yang peduli terhadap lingkungan sehingga dapat memberikan ide atau gagasan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

b. Ancaman (*Threats* – T)

1. Adanya pemancing liar membuang puntung rokok saat memancing yang dapat memicu timbulnya kebakaran di lahan gambut.

Berdasarkan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang dimiliki sebagai peluang dan ancaman terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kekuatan yang ada, meminimalisir kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada serta bagaimana mengatur ancaman menjadi peluang.

Strategi SO—strategi memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang sebesar-besarnya

1. Membentuk kerjasama yang baik antar instansi untuk memberikan pelatihan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara rutin kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) (S1,2,3-O1).
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat (S1,2,3, – O1).
3. Pengembangan tanaman hortikultura jenis nanas oleh pemerintah kabupaten yang berpotensi mewujudkan kegiatan pertanian tanpa bakar (S1,2,3 – O2).
Strategi ST– strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
1. Pemerintah mensosialisasikan ancaman hukuman bagi pembakar lahan kepada masyarakat agar timbul rasa takut apabila melakukannya (S1,2,3,4 – T1,2).
Strategi WO – strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan bagi masyarakat (W1 – O2).
2. Masyarakat memanfaatkan kebun rakyat yang sudah disiapkan pemerintah sehingga tidak perlu membakar dalam penyiapan lahan perkebunan (W4 – O1).
3. Pemerintah perlu memfasilitasi alat berat bagi masyarakat dalam membuka lahan perkebunan dengan syarat dan ketentuan (W4 – O2)
Strategi WT– strategi mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman
1. Melengkapi alat-alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum yang tegas bagi yang melanggarnya. (W1 – T1).

C. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan strategi-strategi tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang bisa

dilaksanakan untuk mengatasi belum optimalnya pengelolaan lingkungan khususnya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya meminimalisir kejadian kebakaran hutan dan lahan guna mewujudkan tujuan yang diinginkan diantaranya adalah :

1. Membentuk kerjasama yang baik antar instansi untuk memberikan pelatihan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara rutin kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).
Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Rokan Hilir dilakukan hanya pada waktu kebakaran hutan dan lahan terjadi, sehingga masyarakat sulit dalam penanggulangan kebakaran tersebut, untuk itu perlu dilakukan kerja sama yang baik antar instansi agar dapat memberikan pelatihan secara rutin dan memantau perkembangan MPA dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan pemadaman secara dini, salah satunya yaitu dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat secara rutin.
3. Pengembangan tanaman hortikultura jenis nanas oleh pemerintah kabupaten yang berpotensi mewujudkan kegiatan pertanian tanpa bakar.
Pengembangan tanaman hortikultura jenis nanas perlu

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir karena jenis tanaman tersebut sangat cocok dengan kondisi tanah gambut terutama di Kepenghuluan Rantau Bais, selain itu jenis nanas juga tahan terhadap api sehingga mampu menjadi sekat bakar bagi kebun masyarakat, selain itu juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

4. Masyarakat memanfaatkan kebun rakyat yang sudah disiapkan pemerintah sehingga tidak perlu membakar dalam persiapan lahan perkebunan.

Kebun rakyat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hendaknya dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu membakar dalam persiapan lahan perkebunan.

5. Pemerintah mensosialisasikan ancaman hukuman bagi pembakar lahan dan kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan agar timbul rasa takut apabila melakukannya.
6. Pemerintah perlu memfasilitasi alat berat bagi masyarakat dalam membuka lahan perkebunan dengan syarat dan ketentuan.
7. Melengkapi alat-alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum yang tegas bagi masyarakat yang lalai yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Alat-alat yang disediakan oleh pemerintah bagi Masyarakat Peduli Api di Kabupaten Rokan Hilir masih kurang yaitu 50 m selang air dan 1 mesin penghisap air, oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan lebih mudah ditanggulangi. Selain itu faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah karena kelalaian manusia

seperti membuang puntung rokok sembarangan saat memancing, untuk itu perlu diberikan tindakan tegas seperti ancaman hukuman penjara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah tingkat pendidikan, budaya membuka lahan dengan cara membakar, jenis pekerjaan, pendapatan dan luas lahan.
2. Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir adalah bergotong royong untuk mematikan api dengan menggunakan alat-alat sederhana dan alat-alat semi mekanis.
3. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:
 - a. Membentuk kerjasama yang baik antar instansi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - b. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
 - c. Pengembangan tanaman hortikultura jenis nanas oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
 - d. Masyarakat memanfaatkan kebun rakyat
 - e. Pemerintah mensosialisasikan ancaman hukuman
 - f. Pemerintah perlu memfasilitasi alat berat bagi masyarakat dalam membuka lahan perkebunan dengan syarat dan ketentuan.
 - g. Melengkapi alat-alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum yang tegas bagi

masyarakat yang lalai yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Saran

1. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai tanaman hortikultura jenis nanas sebagai sekat bakar yang nantinya dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Perlu dilakukan Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat lebih intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani F.2012. **Kendala Asimilasi Etnis Tionghoa dan Etnis Melayu di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau**. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru. (tidak dipublikasikan).
- Anonimous. 2013. **Luas Kebakaran Hutan di Riau**. Antaraneews. Pekanbaru.
- Arikunto, S. 1990. **Manajemen Penelitian**. Penerbit Rieka Cipta. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. **Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Auditorat Utama Keuangan Negara**. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Carter. 1991. **Disaster Management-a Disaster Managers handbook**. New York.
- De Bano, LF, Neary dan P.F.Folliot. 1998. **Fire's Effects On Ecosystem**. Jhon Wiley and Sons. USA.
- Didik S. 2000. **Hutan Rakyat di Jawa, Peranannya Dalam Perekonomian Desa (Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat)**. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Hikmat. 2001. **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Istijanto. 2006. **Riset Sumber Daya Manusia**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kamus Besar bahasa Indonesia. 1996. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP. 1998. **Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, Dampak, Faktor, dan Evaluasi**. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1981. **Masyarakat Desa di Indonesia**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.
- Mangandar. 2002. **Keterkaitan Sosial Masyarakat di Sekitar Hutan dengan Kebakaran Hutan (Studi kasus di Propinsi DT I Riau)**. Tesis Program Pascasarjana IPB. Bogor.
- Moleong LJ. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Rosdakarya Offset. Bandung.
- Mubyarto. 1985. **Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan**. BPEE. Yogyakarta.
- Pasaribu B. 2006. **Rancangan Undang-Undang Lahan Pangan Abadi Tidak Memperkenankan Konversi Lahan Pangan**. Sinar Tani. Jakarta.
- Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2014 **Tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau**. Pekanbaru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001

- Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.** Jakarta.
- Perda Provinsi Kalbar Nomor 6 Tahun 1998 **Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla.** Jakarta.
- Permana, Rizki P dan Kurniawan, Iwan. 2001. **Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Studi Kasus: Petapahan, Propinsi Riau.** Hasil penelitian ICRAF/CIFOR. Petapahan.
- Poerwandari EK. 2007. **Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia.** LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Prijono dan Pranarka. 1996. **Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi.** CSIS. Jakarta.
- Purbowaseso B. 2004. **Pengendalian Kebakaran Hutan.** PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rachmatsjah O. 1985. *Masalah Kebakaran Hutan dan Cara Penanggulangannya.* Bogor.
- Rangkuti, F., 2006, **Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis,** PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Roscoe JT. 1975. **Fundamental Research Statistic for The Behavior Sciencess.** Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Sagala APS. 1988. **Aspek Pengendalian Api Pada Reboisasi di Alang-alang.** Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru. Banjarbaru.
- Santoso, Purwo. 2002. **Merubah Watak Negara.** LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Simon H. 1993. **Metode Inventori Hutan.** Aditya Media. Yogyakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.** Gava Media. Yogyakarta.
- Sumodiningrat G. 1997. **Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.** PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Sunanto. 2008. **Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan (Studi Kasus kelompok Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat).** Tesis Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suratmo F, Gunarwan EA, Husaeni N dan Surati Jaya. 2003. **Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan.** Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Suyanto S. 2001. **Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera.** Ringkasan Hasil penelitian ICRAF/CIFOR. Bandar Lampung.
- Teguh, Ambar S. 2004. **Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.** Gaya Media. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 **Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 **Tentang Kehutanan.** Jakarta.
- Yoza D, Sulaiman R. 2012. **Bahan Ajar Manajemen Pengendalian Kebakaran Hutan.** Fakultas Pertanian UR. Pekanbaru.

Yoza D. 2012. **Model Penentuan Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan Kriteria Fisik Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.** Lembaga Penelitian UR. Pekanbaru.